

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dikatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadikan desa yang lebih maju, mandiri, dan demokratis. Hal ini memberikan harapan bagi desa untuk mengelola secara mandiri dana desa dan mengembangkan potensinya guna pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola dana desa dengan akuntabel, mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, dan dalam menunjang program kegiatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa akan menerima bantuan dana sebesar 10% dari APBN. Sokongan dana tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai ke desa secara bertahap. Alokasi 10% dari APBN tersebut akan menyebabkan penerimaan desa meningkat. Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya memerlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa. Dana desa yang demikian

besar perlu direncanakan penggunaannya secara tepat dan jelas untuk membelanjakan sektor-sektor pembangunan desa. Pencatatan penggunaan dana desa bagi sebagian aparat pemerintah desamengalami kesulitan terutama dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja. Namun demikian pemerintah setiap tahun menyalurkan dana desa secara terprogram dalam APBN ke desa (Murina, 2017).

Laporan keuangan pemerintah desa harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar terciptanya kualitas laporan keuangan yang baik. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada, tidak pula terlepas dinamika perubahan eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi (Sukmaningrum, 2011). Pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa harus mampu menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, memberikan informasi keuangan secara terbuka dan memberikan pengawasan dalam proses pengelolaan keuangan agar menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Diani (2009) seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman akan laporan keuangan desa. Kalimandhanu (2014) mengungkapkan bahwa pemahaman sebagian aparat pemerintah desa

terhadap mekanisme pengelolaan keuangan desa masih rendah. Rendahnya tingkat pendidikan aparat pemerintah desa yang berpengaruh pada rendahnya kualitas SDM membuat pemerintah desa tidak maksimal dalam mengelola anggaran alokasi dana desa. Lestari et al. (2016) menyatakan bahwa faktor utama yang jadi penghambat kesiapan desa dalam penerapan akuntansi desa adalah pemahaman tentang akuntansi desa karena masih kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan pemerintah dan fasilitas yang tersedia di desa kurang memadai sehingga menjadi kendala dalam menunjang terlaksananya program desa.

Ketidakhahaman aparat pemerintah desa tentang pedoman pengelolaan keuangan desa menjadikan pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan desa. Hal lain yang tidak kalah penting adalah pelatihan, mengingat bahwa melalui pelatihan mampu memberikan tambahan kemampuan dalam menghadapi perubahan maupun penyesuaian sistem kerja di masa mendatang. Kualitas sumber daya manusia juga ditentukan oleh masa kerja, karena dengan masa kerja yang lebih lama, aparat desa tentunya telah berpengalaman dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan khususnya dalam penyusunan anggaran dan laporan keuangan. Pelatihan yang diberikan kepada aparat desa diharapkan mampu memberikan tambahan kemampuan dalam menghadapi perubahan maupun penyesuaian sistem kerja di masa mendatang sesuai dengan perkembangan yang ada. Pelatihan tersebut tidak terlepas dari ilmu Akuntansi yang berkaitan dengan penyusunan laporan

keuangan desa yang sesuai dengan pedoman dan prinsip pengelolaan laporan keuangan desa.

Faktor lain yang harus dimiliki oleh aparatur desa adalah kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi sering dimanfaatkan dalam pengoperasian pada organisasi bisnis tetapi juga digunakan oleh organisasi sektor publik dalam mengelola pemerintahan. Menurut Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik.

Dengan adanya pengalaman kerja, aparatur desa dapat menciptakan kemampuan tersendiri ketika melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pengelolaan laporan keuangan desa. Dalam melakukan suatu pekerjaan secara berulang-ulang, aparatur desa akan paham dalam membuat laporan keuangan desa, sehingga dapat memperoleh hasil yang diharapkan. Aparatur desa akan memperoleh cara kerja yang efektif dan efisien dengan pengalaman kerja yang telah mereka dapatkan (Budi,2019).

Penelitian mengenai pengaruh tingkat pendidikan, terhadap pemahaman laporan keuangan sudah pernah dibuat oleh Eriva (2013). Hasil penelitiannya membuktikan bahwa pengaruh tingkat Pendidikan tidak

berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan, sedangkan pelatihan, masa kerja dan jabatan berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan. Penelitian lain dilakukan oleh Budi (2019) membuktikan bahwa tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi dan pengalaman kerja aparatur desa tidak berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan desa, sedangkan pengendalian intern berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan desa.

Penelitian mengenai pengaruh tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan pengalaman kerja aparatur desa terhadap pemahaman laporan keuangan desa sudah pernah dibuat oleh Murina(2017). Hasil penelitiannya membuktikan bahwa pengaruh tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan pengalaman kerja aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap pemahaman laporan keuangan desa. Penelitian lain dilakukan oleh Romandhon (2019) membuktikan bahwa tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan pengalaman kerja aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap pemahaman laporan keuangan desa. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Cahyadi (2009) membuktikan bahwa tingkat Pendidikan, masa kerja, pelatihan, dan posisi di pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemahaman atas laporan keuangan daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Romandhon (2019) yang menggunakan empat variabel independen, yaitu: tingkat Pendidikan, kualitas pelatihan, fasilitas kantor, dan pengalaman kerja aparatur desa. Namun pada penelitian ini peneliti mengambil tiga variabel

yang sama dari penelitian tersebut, yaitu tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, dan pengalaman kerja aparatur desa. Sedangkan variabel yang keempat peneliti mengambil variabel pemanfaatan teknologi informasi. Variabel pemanfaatan teknologi informasi dibutuhkan pada kondisi era digital saat ini, karena sangat menentukan dalam mempengaruhi pemahaman aparatur desa dalam memahami laporan keuangan desa. Sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian dengan empat variabel independen yaitu: tingkat Pendidikan, kualitas pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi dan pengalaman kerja aparatur desa. Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, maka penulis membuat penelitian dengan judul **“Pengaruh tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengalaman kerja aparatur desa terhadap pemahaman laporan keuangan desa pada Aparatur Desa di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan desa pada Aparatur Desa di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?

2. Apakah kualitas pelatihan berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan desa pada Aparatur Desa di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan desa pada Aparatur Desa di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?
4. Apakah pengalaman kerja aparatur desa berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan desa pada Aparatur Desa di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?
5. Apakah tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengalaman kerja aparatur desa secara simultan berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan desa pada Aparatur Desa di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti didasarkan atas rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan desa pada Aparatur Desa di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo
- b. Mengetahui apakah kualitas pelatihan berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan desa pada Aparatur Desa di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

- c. Mengetahui apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan desa pada Aparatur Desa di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo
- d. Mengetahui apakah pengalaman kerja aparatur desa berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan desa pada Aparatur Desa di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo
- e. Mengetahui apakah tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengalaman kerja aparatur desa pada Aparatur Desa secara simultan berpengaruh terhadap pemahaman laporan keuangan desa di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

a. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penambahan ilmu pengetahuan, serta menjadi bahan bacaan di perpustakaan Universitas dan dapat memberikan referensi bagi mahasiswa.

b. Bagi Desa di Kecamatan Sambit

Sebagai bahan masukan atau informasi tambahan bagi Aparatur Desa di Kabupaten Ponorogo tentang pengaruh tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi,

fasilitas kantor dan pengalaman kerja aparatur desa terhadap pemahaman laporan keuangan desa.

c. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan peneliti dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu yang dimiliki, serta sebagai bentuk perbandingan antara teori yang telah dipelajari dengan keadaan yang sebenarnya.

d. Bagi Penelitian yang Akan Datang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam khususnya dalam tingkat pendidikan, kualitas pelatihan, pemanfaatan teknologi informasi, fasilitas kantor, pengalaman kerja aparatur desa dan pemahaman laporan keuangan desa.

